

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

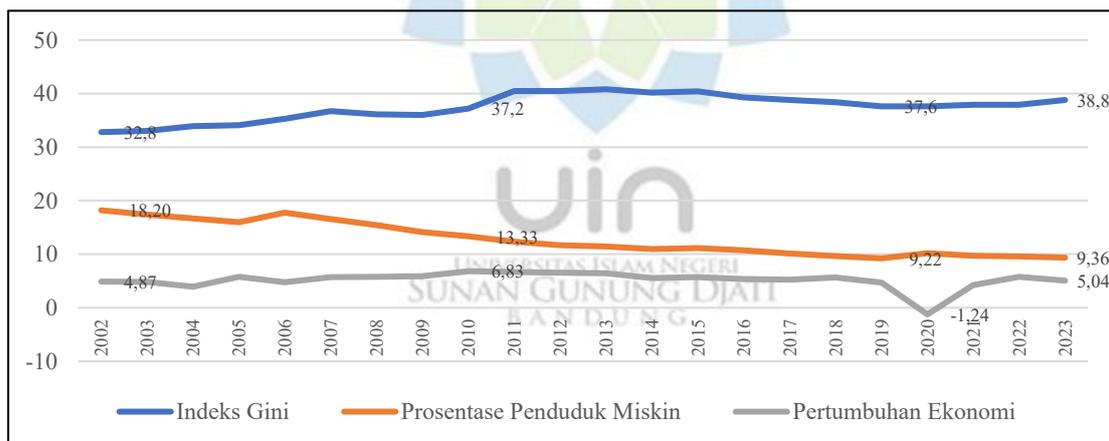
Pada bulan Mei 2022, UNDP, badan pembangunan dunia mempublikasikan sebuah laporan tentang kondisi ketimpangan pembangunan secara global. Kondisi ketimpangan saat ini bergerak menuju lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Kekayaan yang ekstrim hari ini telah berdampak dengan kemiskinan yang ekstrim. Laporan tersebut menyatakan bahwa hari ini sebanyak 50% penduduk termiskin di dunia hanya memiliki 8% total pendapatan di seluruh dunia. Sementara itu, pada saat yang sama 10% orang terkaya dari populasi global memperoleh lebih dari 50% dari total keseluruhan pendapatan secara global

Apa yang terjadi di tataran global merupakan gambaran dari apa yang terjadi di Indonesia. Kondisi ketimpangan yang di *proxy* dengan angka indeks gini menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 20 tahun ini. Pada tahun 2002 angka indeks gini Indonesia mencapai 0,32 lalu pada tahun 2023 angka Indeks Gini Indonesia mencapai 0,38 atau meningkat sekitar 19%. Dari atas kertas meningkatnya angka indeks gini memberikan gambaran bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia pada periode 2002-2023 semakin meningkat.

Namun demikian, dalam konteks Indonesia meningkatnya angka indeks gini ini dibarengi fenomena kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan lambatnya penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2002, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,25 persen lalu sedikit meningkat menjadi 5,04 pada tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan negative menjadi -1,24 di tahun 2020 yang didorong oleh terjadinya pandemic COVID-19. Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bergerak menuju arah yang positif. Beriringan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin Indonesia pada periode 2002-2023 menunjukkan penurunan yang konsisten. Pada tahun 2002 prosentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 16 persen lalu turun menjadi 9 persen di

tahun 2023. Namun demikian penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan gejala melambat atau bahkan stagnan pada periode 2019-2023

Dalam konteks yang lebih luas, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, melambatnya penurunan angka kemiskinan yang diimbangi dengan meningkatnya angka ketimpangan bukan merupakan hal bagus. Hal ini diungkapkan oleh François Bourguignon, pemikir ekonomi asal Prancis yang membuat konsep *growth-poverty-inequality triangle*. Dalam konsep ini, dipahami bahwa dengan adanya distribusi pendapatan yang merata maka upaya penurunan kemiskinan bisa dijalankan dengan efektif oleh pemerintah dibandingkan ketika terjadinya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, dengan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan upaya penurunan angka ketimpangan pendapatana, maka sebuah negara akan berpotensi untuk masuk dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan¹



Sumber: BPS, data diolah peneliti

Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia Periode 2002-2023

Di sisi lain penurunan persentase kemiskinan ini belum tentu menjadi sinyal positif karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak dibanding negara lainnya di dunia. Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 16% atau sekitar 38 juta penduduk di Indonesia yang berada dalam kondisi

¹ Lauchlan T. Munro, "Immiserizing growth: when growth fails the poor," *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement* 41, no. 1 (2 Januari 2020): 161–62, <https://doi.org/10.1080/02255189.2019.1667313>.

miskin. Sementara di tahun 2022 prosentase penduduk miskin Indonesia mencapai 9 persen atau setara dengan 25 juta penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin (BPS,2002-2022)

Jika dibandingkan dengan upaya pendanaan penurunan kemiskinan, prosentase penurunan kemiskinan Indonesia pada periode 2005-2022 telah banyak menguras belanja negara. Pada tahun 2002, dengan angka kemiskinan mencapai 32 juta jiwa maka menghabiskan anggaran senilai Rp.23 Trilyun atau setara dengan Rp.718.000 perkapita. Lalu pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 26 juta jiwa menghabiskan anggaran senilai Rp.161 Trilyun atau setara dengan Rp.6.192.308 perkapita²

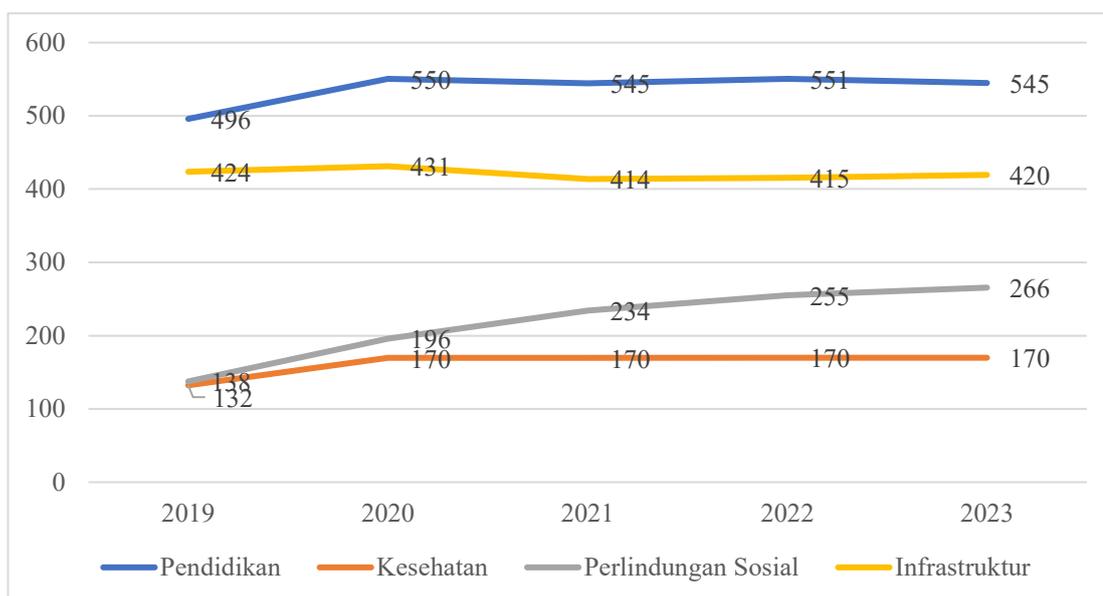


Sumber : BPS, data diolah peneliti

Gambar 1.2 Grafik Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Periode 2002-2022

Di luar alokasi anggaran penangan kemiskinan tersebut, beberapa alokasi anggaran berhubungan erat dengan upaya penurunan kemiskinan seperti alokasi anggaran Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial dan dana desa menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada periode 2019-2023. Lebih detailnya dapat dilihat melalui gambar 1. 3 berikut ini

² Rahayu, Sri Lestari. (2012). Analisis Efektivitas Alokasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Pada Kementerian Negara/Lembaga. In Kajian Ekonomi dan Keuangan (Vol. 16, Issue 3).



Sumber : Nota Keuangan APBN, data diolah

Gambar 1.3 Grafik Alokasi Anggaran Sektoral di Indonesia Periode 2019-2023 (Dalam Trilyun rupiah)

Dari grafik 1.3 di atas dapat disimak bahwa diantara lima anggaran sektoral yang ditampilkan, alokasi anggaran pendidikan merupakan anggaran yang paling besar dibanding sektor lainnya yaitu mencapai Rp 496 Trilyun di tahun 2019 lalu meningkat menjadi Rp.545 Trilyun di tahun 2023. Selanjutnya adalah alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 424 Trilyun di tahun 2019 lalu turun menjadi 415 di tahun 2023. Setelah itu di susul oleh alokasi anggaran untuk sektor perlindungan sosial dan kesehatan yang keduanya meningkat dengan cukup signifikan.

Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk Dana Desa (DD) juga meningkat dengan signifikan. Pada tahun 2015 dimana pertama kali DD di anggarkan, alokasi nya mencapai 20 Trilyun lalu meningkat menjadi 70 Trilyun di tahun 2023.

Dalam kaitannya dengan angka kemiskinan, kenaikan signifikan alokasi anggaran sectoral ini idealnya diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang

signifikan. Namun pada faktanya hal tersebut tidak berbanding lurus, namun cenderung membingungkan.

Dalam sudut pandang ekonomi islam, kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan yang dialami oleh hampir semua negara. Kemiskinan menjadi masalah yang tidak pernah habis diperdebatkan. Pada dasarnya kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan daya beli terhadap berbagai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan maupun tempat tinggal yang layak³

Lebih jauhnya lagi, dalam sudut pandang islam, kemiskinan bukan hanya tentang faktor material berupa pendapatan, namun jauh dari itu, kemiskinan juga dipahami sebagai hal yang berhubungan langsung dengan aqidah dimana kemiskinan bisa menyebabkan manusia berada pada kondisi kekafiran⁴. Oleh karena itu, maka upaya untuk menanggulangi kemiskinan termasuk salah satu diantaranya adalah mempelajari tentang kemiskinan adalah sesuatu yang perlu dilakukan.

Berdasarkan penyelusuran penulis, upaya untuk melihat bagaimana dampak langsung alokasi anggaran terhadap penurunan angka kemiskinan yang menggunakan data ditingkat provinsi dan kabupaten serta alokasi anggaran dana desa masih minim dilakukan oleh para peneliti. Mayoritas kajian mengkaji permasalahan kemiskinan dengan data nasional secara time series. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini relevan untuk dilaksanakan

B. Rumusan Masalah

Masalah inti penelitian ini adalah masih tingginya angka kemiskinan yang dibarengi dengan lambatnya angka penurunan kemiskinan yang berdampak pada tingginya angka biaya untuk menurunkan kemiskinan. Analisis akan difokuskan pada “Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan Dan Transfer Dana Desa, Terhadap Kemiskinan Periode

³ A Jajang W. ; Cupian ; M. Nur Rianto Al Arif ; Tika Arundina ; Tika Widiastuti ; Faizal Mubarak ; Muhamad Fajri ; Azozon ; Aas Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam / A Jajang W. Mahri, Cupian, M. Nur Rianto Al Arif; Editor: Muhamad Irfan S; Ali Sakti .2021*

⁴ Habibah, Nuraini. (2023). Kemiskinan dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Kajian Alquran dan Hadis*. 3(1), 49-63.

2019-2023". Berdasarkan paparan diatas, maka pernyataan rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh belanja pemerintah sektor perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023?
2. Berapa besar pengaruh belanja pemerintah sektor infrastruktur terhadap terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023?
3. Berapa besar pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023??
4. Berapa besar pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023?
5. Berapa besar pengaruh transfer dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023?
6. Berapa besar pengaruh belanja sektor perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan anggaran dana desa secara bersamaan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2025

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan transfer dana desa, terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023. Adapun secara spesifik bertujuan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh belanja pemerintah sektor perlindungan sosial terhadap angka kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023?
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh belanja pemerintah sektor infrastruktur terhadap terhadap angka kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023?
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh belanja pemerintah sektor Pendidikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap angka kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023

5. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh transfer dana desa terhadap angka kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023?
6. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh belanja sektor perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan alokasi dana desa secara bersamaan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berkontribusi pada pengembangan pengetahuan perekonomian ekonomi islam yang terkait dengan belanja pemerintah bidang perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan transfer dana desa, terhadap kemiskinan di Indonesia
2. Sebagai salah satu sumber pembelajaran mata kuliah ekonomi makro dan ekonomi pembangunan khususnya materi kemiskinan dan belanja pemerintah
3. Sebagai sumbangan referensi penelitian untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan topik kemiskinan, belanja pemerintah dan transfer anggaran pemerintah

Sementara manfaat praktis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk para peneliti, hasil penelitian mampu menjadi bahan ajar pada materi tentang kemiskinan dan ketimpangan sehingga setiap mahasiswa dapat mempunyai kemampuan menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, terhadap kemiskinan.
2. Untuk pemerintah, baik pemerintah pusat atau provinsi, kabupaten hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses penyusunan kebijakan mengenai penurunan kemiskinan
3. Bagi masyarakat umum, sebagai bahan rekomendasi dalam proses partisipasi dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model secara konseptual yang memberikan penjelasan mengenai keterhubungan antara teori dengan berbagai faktor lain yang telah dipilih sebagai isu penting dan relevan. Dalam kerangka berpikir ini penulis membagi variabel penelitian ke dalam dua jenis variabel. Pertama, adalah variabel bebas atau disebut dengan variabel independen atau dalam penelitian ini disebut dengan variabel X. Kedua, variabel terikat atau disebut dengan istilah variabel dependen atau disebut dengan variabel Y.

Variabel X dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel yaitu variabel belanja sektor perlindungan sosial (X_1), Belanja sektor infrastruktur (X_2), belanja sektor Pendidikan (X_3), belanja sektor kesehatan (X_4) dan transfer dana desa (X_5). Variabel Y dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu angka kemiskinan (Y).

Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini sering kali berhubungan dengan kekurangan materi, namun juga dapat mencakup keterbatasan dalam kesempatan ekonomi, sosial, dan politik. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada kekurangan uang, tetapi juga dapat mencakup ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan materi atau harta, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan sosial. Umumnya, kemiskinan dalam Islam dipahami sebagai keadaan di mana seseorang tidak mempunyai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Namun, Islam lebih jauh memandang kemiskinan sebagai keadaan yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat, karena Islam mendorong pembagian rezeki dan keberlanjutan ekonomi secara adil dan merata.

Islam juga menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai keadaan materi, tetapi juga sebagai ujian dan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: Kemiskinan bisa mendekati seseorang kepada kekufuran." (HR. Tirmidzi).

Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya menjaga keimanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Permasalahan kemiskinan erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Semakin kecil angka kemiskinan maka semakin berhasil sebuah daerah dalam menjalankan program Pembangunan mereka masing-masing. Salah satu instrument kunci dalam menjalankan program Pembangunan adalah instrument kebijakan fiskal atau belanja.

Secara umum dalam pandangan islam sebuah kebijakan hendaknya mengacu pada kaidah kemaslahatan. Kaidah kebijakan kemaslahatan ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah harus diorientasikan untuk tercapainya kemaslahatan hidup masyarakat yang ada dalam sebuah negara.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :“Kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahat”

Secara spesifik, dalam perspektif ekonomi islam, belanja pemerintah secara umum dipahami sebagai bentuk operasional dari kebijakan fiskal yang tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan dan mendorong agar perekonomian bisa berkembang dan dalam keadaan stabil⁵

Secara spesifik, konsep kebijakan fiskal dalam islam mengacu pada sebuah kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan penggolongan keuangan negara yang diatur oleh prinsip islam. Dalam pandangan islam, konsep dan kebijakan fiskal

⁵ Zakiyatul Miskiyah et al., “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam,” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (June 6, 2022): 69–83, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.

mengacu pada berbagai aspek seperti pengumpulan pendapatan, pengeluaran pembelanjaan, pengelolaan anggaran yang berlandaskan nilai-nilai islam.

Lebih lanjutnya lagi, dalam sudut pandang ekonomi islam, kebijakan fiskal bukan hanya kebijakan untuk mendapatkan dan membelanjakan uang negara, namun juga dalam rangka menciptakan keadilan ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan fiskal dalam Islam berkelindan erat dengan dimensi moral dan sosial. Hal tersebut menjadi pemandu utama menjalankan kebijakan fiskal dalam perspektif islam⁶

Dalam konteks belanja negara secara khusus, kebijakan fiskal islam memberikan panduan bahwa belanja pemerintah berpegang teguh pada upaya pemenuhan kebutuhan primer warganya. Upaya pemenuhan kebutuhan primer ini merupakan jaminan negara kepada rakyatnya terutama kepada masyarakat yang kurang memiliki untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam sudut pandang islam bukan hanya berlandaskan pada dimensi moral dan sosial, namun juga berlandaskan pada nilai etika yang kuat⁷

Seyed Kazem dalam bukunya yang berjudul “*The Economic System of the Early Islamic Period: Institutions and Policies*” memperinci bahwa salah satu penanda penting pengaturan kebijakan fiskal dalam islam adalah dengan didirikannya sebuah lembaga yang diberi nama *Baitul Maal*. Pada fase awal pembentukan *Baitul Mal* ini, mayoritas pengeluaran ditujukan untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja dan produksi⁸

Secara mendetail, sehubungan dengan keberadaan masyarakat miskin, sebagian besar pengeluaran *Baitul Maal* waktu itu dikeluarkan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pada fase itu, masyarakat

⁶ Royani, Yadi Janwari and Sofyan Al-Hakim (2024) “Fiskal Policy in Islam (Pre-Risalah, During the Prophet’s time and Rashidun Caliphs)”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 578–605. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1041.

⁷ Irfan Hamdani et al., “Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah,” *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 1, no. 3 (June 2, 2023): 187–203, <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.902>.

⁸ Hossein Askari and Dariush Zahedi, “Political Economy of Islam Series Editors,” n.d., <http://www.springer.com/series/14544>.

yang berpenghasilan rendah akan terus didampingi oleh pemerintah sampai mereka kemudian mampu membayar zakat.

Dalam konteks ini, jelas bahwa tujuan belanja *Baitul Maal* untuk masyarakat miskin waktu itu bukan mendorong masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan menjadi orang kaya. Namun jauh dari hal tersebut, upaya membelanjakan uang negara ditujukan agar masyarakat mampu menunaikan salah satu kewajiban seorang muslim yaitu membayar zakat

Selanjutnya, dalam buku tersebut Kazem menjelaskan bahwa terdapat dua domain utama belanja publik pada periode tersebut. Pertama, pembayaran transfer dan investasi modal. Belanja yang termasuk dalam domain ini mencakup pengeluaran untuk mempertahankan kondisi minimum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Jenis pengeluaran ini lebih bersifat pengeluaran konsumtif.

Di era sekarang, para ulama kemudian menyebut belanja tersebut sebagai belanja perlindungan sosial untuk masyarakat miskin. Kedua, adalah pembelanjaan untuk investasi dalam pengembangan pengetahuan masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna. Secara ringkas kebijakan fiskal, khususnya kebijakan belanja pada fase ini yang kemudian menjadi fondasi kuat kebijakan fiskal kedepannya adalah untuk mengubah tingkat produksi, meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa misi kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal* waktu itu adalah untuk memastikan tingkat pendapatan minimum dan kesejahteraan sosial untuk semua penduduk tanpa kecuali yang hidup di bawah bendera Islam.

Dalam perspektif yang lain, yaitu perspektif ekonomi klasik, kebijakan fiskal yang khusus berkaitan dengan pembelanjaan berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pertumbuhan dan produktivitas masyarakat. Adanya campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan akan mendorong terjadinya pembangunan yang maksimal dan stabil. Sebagai konsekuensi logis atas hal ini, maka peran

pemerintah dalam bidang moneter ataupun fiskal harus dijalankan dengan maksimal⁹

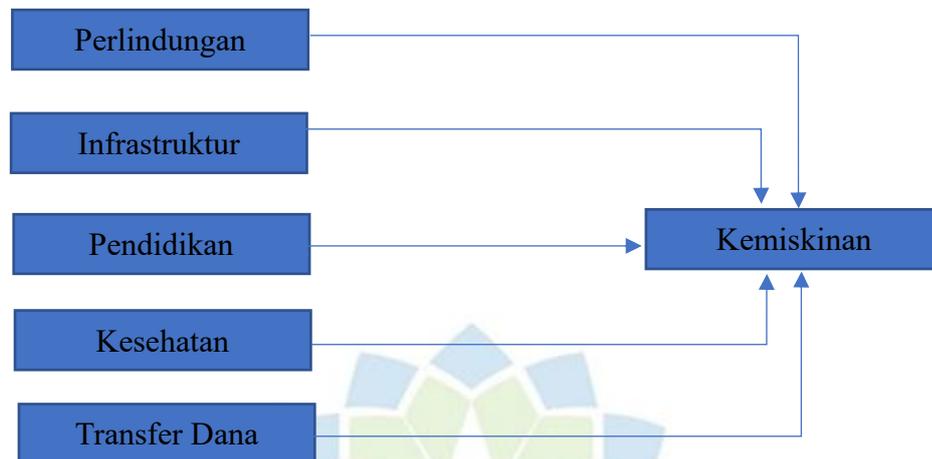
Secara lebih dalam, peran pemerintah dalam kebijakan fiskal, untuk menstabilkan kondisi perekonomian dibagi ke dalam tiga fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi. Semua Sumber daya yang dikuasai secara mendasar dapat di dayagunakan untuk menghasilkan *private goods* serta *public goods*. *private goods* adalah barang yang penyediaanya bisa di penuhi oleh sistem pasar yaitu melalui sistem jual beli. Namun, bukan berarti semua pemenuhan barang harus dan bisa dipenuhi oleh swasta. Ada barang yang upaya pemenuhannya harus dilakukan oleh negara atau istilahnya disebut dengan *public goods*.
2. Fungsi distribusi. Pemerintah dapat memperbaiki komposisi distribusi pendapatan rakyatnya melalui kebijakan fiskal dengan memberlakukan sistem pajak progresif dimana orang kaya akan membayar pajak lebih besar daripada masyarakat miskin. Dengan kebijakan fiskal juga pemerintah dapat memberikan subsidi kepada masyarakat miskin
3. Fungsi stabilitas. Pemerintah mempunyai fungsi untuk menciptakan stabilitas perekonomian dengan menggunakan berbagai instrument regulasi. Tujuan utama fungsi stabilitas ini ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi bagi masyarakat, kestabilan harga-harga dipasaran dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami keterhubungan antara variabel X dan Y Dimana semakin besar alokasi belanja pemerintah untuk mengatasi kemiskinan maka angka kemiskinan akan menurun. Dengan demikian, dalam kerangka berpikir ini, semakin besar alokasi belanja pemerintah untuk sektor Perlindungan sosial (X_1), belanja sektor infrastruktur (X_2), belanja sektor Pendidikan (X_3), belanja sektor kesehatan (X_4) dan transfer dana desa (X_5) maka angka semakin menurunkan angka kemiskinan. Secara skematik kerangka berpikir

⁹ Iskandar, Azwar. Kajian Ekonomi et al., "Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy," *Kajian Ekonomi Keuangan*, vol. 20, 2016, <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>.

penelitian ini bisa digambarkan dalam model skema kerangka berpikir sebagai berikut:



Sumber: Penulis

Gambar 1.4 Skema Kerangka Berpikir Penelitian

